

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari konteks pembangunan masyarakat. Pembangunan yang selama ini dilakukan adalah untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Ada dua pendekatan dalam pembangunan yang dilakukan selama ini, yakni pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*. Pendekatan *top down* merupakan bentuk *blue print strategy*, yakni pendekatan yang bersumber pada pemerintah, dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai sasaran atau obyek pembangunan saja. Sebaliknya pendekatan *bottom up* adalah pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi. Pendekatan ini sering disebut sebagai *people centered development* (Korten, dalam Sulistiyani, 2004:37).

Kondisi ekonomi saat ini berimbas pada menurunnya produktivitas dunia usaha, rendahnya peluang kerja dan usaha, membengkaknya angka pengangguran, serta menurunnya tingkat pendapatan (*income perkapita*) masyarakat. Kondisi ini telah mengakibatkan bertambahnya jumlah keluarga miskin yang tersebar diberbagai wilayah. Kemiskinan menjadi ancaman bagi keluarga tertentu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sekalipun karena tidak memiliki penghasilan yang memadai.

Kemiskinan berkaitan dengan kebutuhan dasar, status sosial dan kelangsungan hidup yang tidak terjamin, seperti menyangkut soal kebutuhan dasar dan sekaligus status sosial, baik individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Persoalan kemiskinan juga menyangkut kelangsungan kehidupan. Keterbatasan kemampuan untuk memiliki kebutuhan pokok dan fasilitas penunjang kehidupan lainnya, menunjukkan keterbatasan dalam mempertahankan kelangsungan kehidupannya.

Pembangunan ekonomi nasional dewasa ini diarahkan dalam membangun kemampuan ekonomi masyarakat, melalui peningkatan kemandirian, keterampilan

dan wirausaha yang secara langsung berpengaruh pada perbaikan ekonomi, pendapatan maupun kesejahteraan keluarga.

Langkah yang harus diprioritaskan dalam mengatasi kondisi tersebut yaitu dengan mendorong usaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk dapat mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan dan memperkuat kemampuan ekonomi sebagai pondasi ekonomi nasional. Disamping itu, pemberdayaan keluarga dalam mendapatkan kesempatan bekerja dan berusaha dalam meningkatkan pendapatan.

Pemberdayaan keluarga miskin dilakukan melalui pengembangan usaha kecil yang umumnya berbasis dirumah tangga dan melibatkan potensi keluarga. Dalam menjalin kelangsungan dan kemajuan usaha-usaha dimaksud diperlukan perhatian memadai dari pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha, baik perhatian dilakukan secara sendiri-sendiri maupun dalam kerangka kerjasama diarahkan untuk membantu ekonomi keluarga dipandang tidak mampu dalam membiayai berbagai kebutuhan hidup, khususnya kebutuhan pokok.

Upaya yang dilakukan dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat miskin dan golongan ekonomi lemah ini menjadi semakin penting, karena cara tersebut diyakini sebagai salah satu cara menormalkan kembali sistem ekonomi nasional yang selama ini dipandang rapuh, sekaligus menghindari kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat dengan memberdayakan usaha-usaha di sektor informal, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, telah dicanangkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Salah satu program dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Program ini merupakan program hasil korektif dari program terdahulu seperti P3DT dan IDT. Mulai tahun 2007 PNPM-MP mengalami beberapa penyempurnaan, untuk mendukung efektivitas realisasi

prinsip-prinsip PNPM-MP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun 2008.

Tujuan dari program PNPM-MP adalah mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal serta penyediaan prasarana sosial dasar. Keberhasilan PNPM-MP dapat dilihat antara lain dari tingkat efektivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Efektivitas kegiatan tercermin dari masing-masing kegiatan mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pelestarian.

Dalam pelaksanaannya program PNPM-MP memberi bantuan berupa fisik maupun non fisik di desa-desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, gedung Pos Kesehatan Desa (PKD), pasar desa, talud, irigasi, pemberian pinjaman, pelatihan keterampilan, modal usaha produktif dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekitar. Untuk tataran nasional PNPM-MP telah berhasil menyediakan lapangan kerja sekaligus menambah penghasilan bagi masyarakat miskin, bahkan telah memperhatikan masalah kesetaraan gender dengan menambah satu kegiatan khusus untuk kelompok perempuan, yaitu kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPKP).

Kurangnya perilaku peduli dan rendahnya inisiatif dalam program pembangunan tampaknya masih begitu mengakar, akibat internalisasi nilai-nilai pembangunan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Sepertinya nilai tersebut telah mengkristal dan tertanam di hati masyarakat Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah, bahwa program dari pemerintah adalah merupakan *given* saja, oleh karena itu oleh masyarakat diterima sebagai suatu pemberian yang harus diterima apa adanya (*taken for granted*).

Sesuai hasil pengamatan awal penelitian kendala - kendala yang sering terjadi pada Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) ini diduga disebabkan oleh :1) Kegiatan simpan pinjam belum menerapkan pertimbangan yang obyektif; 2) Belum semua sasaran kelompok orang miskin dapat terjangkau; (3) Transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya bisa diwujudkan; (4) Masih adanya dominasi individu atau kelompok pada sasaran PNPM serta; (5) Sanksi yang telah disepakati belum diterapkan.

Dari fenomena yang dideskripsikan sebelumnya merupakan pendorong utama yang menjadi alasan dalam penentuan masalah SPKP yang diformulasikan dengan judul: **”Kendala-kendala Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apa Kendala-kendala Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kendala-kendala Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

1.1 Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan pendidikan, khususnya tentang problematika program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP).

1.2 Mengembangkan potensi untuk penulisan karya ilmiah, khususnya bagi pribadi peneliti maupun kalangan akademisi, dalam memberikan informasi kepada dunia pendidikan akan pentingnya program SPKP.

2. Secara Praktis

2.1 Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango.

2.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam meningkatkan eksistensi program PNPM, serta berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya khususnya menyangkut bidang SPKP.